

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGAWASAN BADAN MUSYAWARAH NAGARI (BAMUS)
DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DI
NAGARI BAYUA KECAMATAN TANJUNG RAYA
KABUPATEN AGAM**

SKRIPSI



OLEH :

TIKA TRIANA

11675200226

UIN SUSKA RIAU
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Tika Triana
Nim : 11675200226
Jurusan : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Judul Skripsi : Pengawasan Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Nagari Bayua Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam
Tanggal Ujian : 10 Agustus 2020

Disetujui oleh,

Ketua Penguji



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
NIP. 19790101 200710 1 003

UIN SUSKA RIAU

Penguji I

Penguji II



Devi Deswimar, S.Sos, M.Si
NIK. 130 411 027



Ikhwani Ratna, SE, M.Si
NIP. 19830827 201101 2 014

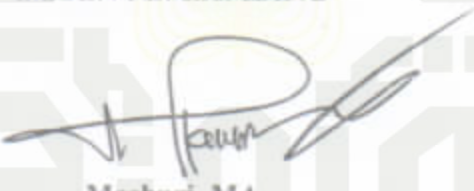
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : TIKA TRIANA
NIM : 11675200226
FAKULTAS/ JURUSAN : Ekonomi dan Ilmu Sosial/ Ilmu Administrasi Negara
JUDUL SKRIPSI : Pengawasan Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) Dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Nagari Bayua Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam

DISETUJUI OLEH :
DOSEN PEMBIMBING



Mashuri, MA
NIP.19770721 201411 1 002

MENGETAHUI :

DEKAN
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

KETUA JURUSAN
Administrasi Negara


Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003


Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
NIP. 19790101 200710 1 003



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

TIKA TRIANA
11675200226

*Skripsi ini berjudul : **Pengawasan Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) Dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Nagari Bayua Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam***

Badan Musyawarah Nagari memiliki fungsi yang strategis dalam penetapan kebijakan nagari serta pengawasan yang dilakukannya kepada pemerintah nagari karena fungsinya selaku badan pengawas. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintah merupakan salah satu alasan terpenting mengapa BAMUS dibentuk. Masyarakat nagari sangat berharap agar BAMUS bisa menjalankan fungsinya dalam bidang pengawasan terutama penggunaan dana nagari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Pengawasan Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) Dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Nagari Bayua Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh BAMUS Nagari Bayua dalam mengawasi pembangunan Nagari di Nagari Bayua Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Informan penelitian adalah perangkat nagari, anggota BAMUS dan tokoh masyarakat. Data dikumpulkan melalui dokumentasi, observasi dan wawancara dengan analisis kualitatif. Dengan indikator penelitian. Pengawasan BAMUS dalam pembangunan masih kurang optimal, membuat pengawasan belum dilakukan secara detail, hal ini dikarenakan juga karena setiap anggota memiliki kesibukan pada pekerjaan utama mereka, inilah yang menyebabkan masih kurang optimal pengawasan BAMUS dalam hal pembangunan, dengan adanya pengawasan yang maksimal maka rencana pembangunan di desa atau nagari akan berhasil.

Kata Kunci : Pengawasan, Pembangunan, Nagari



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirabbil 'alamin, sedalam syukur dan setinggi puji penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta taufik dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini, shalawat serta salam tidak lupa pula penulis doakan semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Nabiullah, Habibullah Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang terang menerang yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Dengan izin dan rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan Judul **"Pengawasan Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) Dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Nagari Bayua Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam"**, merupakan karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi sebagai persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Sosial pada Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Selanjutnya, pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan rasa ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membimbing dan mendukung penulis baik dengan moral maupun material selama berlangsungnya penyusunan proposal ini. Dengan segala kemurahan hati, penulis menganturkan banyak terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah membimbing, memberikan kekuatan dan kesabaran yang sangat besar bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, tanpa bantuan-Nya, mungkin penulis tidak akan mempunyai kekuatan untuk terus berusaha menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orangtua tercinta, Ayahanda Edy Busri (Alm) Dan Ibunda Desmiarti yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, semangat dan untaian doa yang terus mengalir kepada peneliti sejak kecil hingga saat ini, serta memberikan dukungan penuh terhadap penulis dalam menyusun pembuatan proposal ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr.Drs. H. Muh Said HM. M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tempat dimana penulis banyak menimba ilmu disana.
4. Bapak Dr. Kamaruddin S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tempat dimana penulis banyak menimba ilmu disana.
5. Bapak Jhon Afrizal, S.HI, M.A selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tempat dimana penulis banyak menimba ilmu disana.
6. Bapak Mashuri M.A selaku Dosen pembimbing proposal yang memberikan masukan dan arahan kepada penulis dalam pembuatan proposal serta dapat meluangkan waktu dan pikiran serta sabar dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kedua Saudara kandung penulis, Sari Rahmawati, M.Pd dan Ns.Edvina Nofriani,S.Kep yang telah memberi semangat dan dukungan kepada penulis.
8. Sahabat-sahabat dan teman seperjuangan penulis, Lokal C Angkatan 2016 jurusan Administrasi Negara, terutama untuk Vinny Putri Utami, Nabiila Saniyah, Nurnia Syafitri, Shindy Okta Fani, Nurrijaliana, dan Laili Salamatul Khoiriyah semangat serta pemikirannya kepada penulis.
9. Teman seperjuangan penulis yaitu Alfiyah, Nova Nanda Ayu Wardhani Nasution, Sandra Oktasari, yang selalu bersama dengan penulis hingga saat ini serta buat Kakak Kos penulis Syarifah yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang turut membantu penulis, baik langsung maupun tidak langsung. Hanya terima kasih yang tulus yang dapat penulis ucapkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan yang telah diberikan dan semoga proposal ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita kejalan yang penuh kebaikan dan kebenaran. Aamiin ya Rabbal 'alamiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pekanbaru, Agustus 2020

Tika Triana
NIM. 11675200226



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daftar isi

Persetujuan	
Pengesahan	
Abstrak.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar isi	
Daftar Tabel.....	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4 . Manfaat Penelitian	9
1.5. Sistematika Penulisan	10
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1.Pemerintahan Daerah	12
2.2.Konsep Pengawasan.....	16
2.3. Konsep Pembangunan.....	20
2.4.Badan Permusyawaratan Nagari	23
2.5.Pengertian Nagari.....	24
2.6. Sejarah Perkembangan Nagari	26
2.7. Konsep Pengawasan Dalam Islam	29
2.8. Penelitian Pendahuluan	29
2.9. Defenisi Konsep	30
2.10. Indikator Penelitian	32
2.11. Kerangka Pemikiran.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian	34
3.2. Jenis dan Sumber Data	34
3.3. Metode Pengumpulan Data	35
3.4. Informan Penelitian	36

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.5. Metode Analisis	38
BAB IV GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN	
4.1. Sejarah Nagari Bayua.....	39
4.2. Keadaan Wilayah	40
4.3. Kependudukan.....	43
4.4. Pemerintahan Nagari Dan Lembaga-Lembaga Nagari	53
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
5.1. Pengawasan Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) Dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Nagari Bayua Kecamatan Tanjung Raya	61
5.2. Kendala- Kendala Yang Dihadapi BAMUS Nagari Bayua Dalam Mengawasi Pembangunan Nagari di Nagari Bayua Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam	73
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	
6.1. Kesimpulan	75
6.2. Saran.....	76
Daftar Pustaka	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Daftar Tabel

Tabel 1.1	APB Nagari Bayua Tahun 201	95
Tabel 1.2	Data Pembangunan Nagari Bayua Tahun 201.....	97
Tabel 3.4.1	Daftar Informan Penelitian.....	37
Tabel 4.2.1	Jorong Di Nagari Bayua.....	41
Tabel 4.2.2	Luas Menurut Pemanfaatan Lahan.....	42
Tabel 4.2.3	Orbitasi Waktu Tempuh	43
Tabel 4.3.1	Nama – nama Jumlah KK , Jumlah Jiwa di Nagari Bayua.....	44
Tabel 4.3.2	Jumlah Petani dan Pekebun	45
Tabel 4.3.3	Sarana teknologi Pertanian.....	45
Tabel 4.3.4	Jumlah Pembudidaya Ikan	45
Tabel 4.3.5	Jumlah Peternak	46
Tabel 4.3.6	Jumlah Penduduk Di Sektor Perdagangan/ Jasa	46
Tabel 4.3.7	Prasarana pendidikan	47
Tabel 4.3.8	Jumlah Angkatan Kerja.....	48
Tabel 4.3.9	Jumlah Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan	48
Tabel 4.3.10	Jumlah Bidan di Nagari Bayua.....	50
Tabel 4.3.11	Sarana dan Prasarana Olah Raga di Nagari Bayua	51
Tabel 4.3.12	Nama – Nama tempat Ibadah yang ada di Nagari Bayua	52
Tabel 4.4.1	DAFTAR NAMA WALI NAGARI, SEKRETARIS DAN PERANGKAT TAHUN 2019	55
Tabel 4.4.2	Struktur Kepengurusan BAMUS.....	57
Tabel 4.4.3	Badan kepengurusan KAN (Kerapatan Adat Nagari)	58
Tabel 5.1	Peraturan Nagari Bayua 2016	67
Tabel 5.2	Kegiatan BAMUS Nagari Bayua	72



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan politik di Indonesia senantiasa mengalami kemajuan dari orde lama sampai sekarang. Kebijakan politik maupun pemerintahan orde lama lebih menekankan pada keleluasaan sentralisasi, dimana semua urusan diserahkan sepenuhnya ke pusat. Hal ini tentunya belum sepenuhnya terdapat adanya otonomi daerah. Baik di tingkat desa sampai tingkat provinsi. Masing-masing daerah sepenuhnya disetir oleh pemerintah. Di tingkat desa misalnya, kebijakan-kebijakan pemerintah melalui perangkat desa merupakan kebijakan atasannya dari Camat, Bupati, Gubernur, sampai ke pusat, sehingga perangkat desa belum memaksimalkan keadaan desa yang dipimpinnya.

Kehadiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diharapkan mampu memperkuat posisi Kabupaten Agam dalam mengembangkan dan mengatur pembangunan di daerah tersebut. Ukuran efektifitas suatu peraturan perundang-undangan di tingkat daerah tidak hanya dapat diletakkan dalam tolak ukur angka-angka kemajuan statistik saja (kuantitatif), tetapi juga harus dilihat sejauh mana keberpihakan peraturan itu terhadap kepentingan rakyat dalam mewujudkan kesejahteraan dan kedamaian masyarakat khususnya menyangkut keanekaragaman, partisipasi otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Karena itu, Pasal 18 Undang – Undang Dasar 1945 antara lain menyatakan “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pemerintahnya ditetapkan dengan undang – undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak – hak asal usul yang bersifat istimewa”. Dengan demikian Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah di syahkan pada tanggal 14 Januari 2014 dan telah dilaksanakan secara serentak diseluruh Indonesia, Undang-Undang tersebut menjadi landasan pemberian otonomi secara luas kepada daerah kabupaten maupun kota, utamanya dalam mengekspresikan potensi pembangunan yang dimiliki. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sebagai perwujudan demokrasi, di desa dibentuk Badan Permusyawaratan yang dulunya Lembaga Musyawarah Desa (LMD) yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anggota Badan Permusyawaratan adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Badan Permusyawaratan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa yang anggotanya terdiri dari tokoh masyarakat, RT, RW yang dipilih oleh rakyat. Kepala desa dan perangkat desa tidak boleh menjadi anggota maupun ketua BPRN, sehingga Kades tidak mempunyai peran penting bahkan kades diawasi oleh BPD. Sedangkan LMD seperti di jelaskan dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1974 dan Undang-Undang No. 5 tahun 1974 dan Undang- Undang No.5 tahun 1979 yang mengatur tentang LMD dimana pengurus LMD terdiri dari perangkat desa tokoh masyarakat dan ketuanya adalah kepala desa sehingga tampak Kades mempunyai peranan penting di desa atau otonom.

Peranan Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) sangat dibutuhkan guna terciptanya pembangunan yang merata dan seimbang. Oleh karena itu kehadiran Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) dalam Pemerintahan Nagari dengan berbagai fungsi dan kewenangannya yang sangat signifikan hendaknya mampu mengayomi dan memberikan segala kemampuannya untuk kemaslahatan masyarakat serta diharapkan lebih berperan dan mampu menjalankan tugas yang telah diamanahkan oleh masyarakat serta mampu mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Arti penting dan prospektif pembentukan Badan Permusyawaratan Desa adalah: Pertama, kehadirannya merupakan wahana bagi kehidupan berdemokrasi di Desa. Kedua, sebagai jawaban kongkrit ketidakberdayaan institusi-institusi demokrasi formal di perdesaan. Ketiga, mendorong terciptanya proses

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penyelenggaraan pemerintahan Desa yang demokratis, akuntabilitas, transparansi, kejujuran, kesetaraan dalam pelayanan, partisipasi masyarakat, konstitusional berjalan diatas aturan yang ada. Keempat, berkurangnya monopoli kekuasaan politik yang selama ini sentralistik (Kepala Desa selama ini sebagai penguasa tunggal). Kelima, menumbuhkan kesadaran baru kepada warga desa akan hak-hak tanggungjawab sebagai warga Negara dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Keenam, merupakan pengalaman berharga bagi pemerintah bahwa kebijakan selama ini (mengenai Desa) ada kekeliruan yang dapat mematikan inisiatif dan kreasi masyarakat (dalam Bastion Skripsi 2009;4).

Lahirnya Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) di Bayua Kecamatan Tanjung Raya merupakan konsekwensi dari implementasi otonomi daerah. Dalam jangka waktu yang relatif cepat lembaga ini dibentuk untuk melakukan pilkades. Lembaga yang masih muda ini adalah lembaga legislatif desa yang baru dalam kehidupan demokrasi di tingkat desa, seharusnya memiliki tanggung jawab penuh untuk menjalankan peranan atau fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap lembaga, termasuk Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) Di Nagari Bayua Kecamatan Tanjung Raya akan seoptimal mungkin melaksanakan peran atau fungsinya secara baik, namun semua itu harus dipersiapkan secara matang dan terencana. Disinilah partisipasi rakyat melalui Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) ini akan terlihat, karena lewat Badan Musyawarah Nagari (BAMUS NAGARI) ini masyarakat dapat ikut menentukan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desanya dengan fungsi legislasi dan kontrol yang dimiliki.

Tabel 1.1
APB Nagari Bayua Tahun 2019

Bidang/ Kegiatan	Jumlah Anggaran
Bidang Penyelenggaraan pemerintahan nagari	818.913.593,56
Penyediaan Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan wali nagari	41.300.000,00
Penyediaan Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan perangkat nagari	391.660.000,00
Penyediaan jaminan sosial bagi wali nagari dan perangkat nagari	24.942.588,00
Penyediaan operasional pemerintah nagari	158.230.980,56
Penyediaan tunjangan BAMUS Nagari	47.200.000,00
Penyediaan operasional BAMUS Nagari	25.550.000,00
Penyediaan Sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintah	58.988.325,00
Penyusunan pendataan, dan pemutakhiran profil nagari	24.000.000,00
Penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa/ Pembahasan APB	23.865.000,00
Penyusunan dokumen perencanaan nagari	10.600.000,00
Penyusunan dokumen keuangan nagari	7.176.700,00
Dukungan dan sosialisasi pelaksanaan Pilwana, Pemilihan Ka. Kewilayahan, Bamus nagari, dll	5.400.000,00
Bidang Penyelenggaraan Pembangunan	903.357.498,13
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah non formal milik nagari	10.000.000,00
Dukungan penyelenggaraan PAUD (APE, sarana PAUD, dsb)	21.099.171,00
Dukungan pendidikan bagi siswa miskin/ kurang mampu	10.000.000,00
Penyelenggaraan posyandu	31.700.000,00
Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/pengadaan sarana/prasarana posyandu/polindes	197.825.059,53
Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan nagari	123.176.804,50
Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan pemukiman gang	90.857.819,10
Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani	317.901.498,00
Dukungan pelaksanaan program pembangunan/ rehab rumah tidak layak huni GAKIN	53.028.305,00
Pengelolaan lingkungan hidup milik nagari	15.580.679,00
Penyelenggaraan informasi public milik nagari	3.880.000,00
Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana & prasarana pariwisata milik nagari	28.308.162,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	183.282.879,91
Penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, &	24.560.000,00

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

keagamaan	
Pengiriman kontingen kepemudaan & olahraga sebagai wakil nagari	22.517.500,00
Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana & prasarana kepemudaan olahraga milik nagari	98.256.379,91
Pembinaan lembaga adat	37.949.000,00
Bidang pemberdayaan masyarakat	395.064,291,40
Peningkatan kapasitas perangkat nagari	7.127.500,00
Pelatihan & penyuluhan pemberdayaan perempuan	11.305.000,00
Pembentukan BUM nagari	6.425.750,00
Pembangunan/ rehab pasar nagari/ kios milik nagari	370.206.041,40
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat & mendesak bagi nagari	13.548.409,00
Kegiatan penanggulangan bencana	13.548.409,00
JUMLAH BELANJA	2.314.166.672,00

Sumber: Kantor Walinagari Bayua Tahun 2019

BAMUS ini memiliki fungsi yang strategis dalam penetapan kebijakan nagari serta pengawasan yang dilakukannya kepada pemerintah nagari karena fungsinya selaku badan pengawas. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintah merupakan salah satu alasan terpenting mengapa BAMUS dibentuk. Masyarakat nagari sangat berharap agar BAMUS bisa menjalankan fungsinya dalam bidang pengawasan terutama penggunaan dana nagari. Hal ini sebagai konsekuensi atas berlakunya UU nagari dikarenakan adanya kucuran dana miliaran rupiah langsung ke nagari yang bersumber dari alokasi dana nagari yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/ kota.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan Nagari yang dipimpin Wali Nagari merupakan tugas BAMUS, upaya pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari, melakukan pengawasan terhadap bagaimana suatu program pemerintah, fungsi pemerintahan, peraturan dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

keputusan yang telah ditetapkan bersama BAMUS dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari.

Tabel 1.2
Data Pembangunan Nagari Bayua Tahun 2019

Uraian	Keterangan
Lanjutan Jalan Simpang Kampung Jambu	Terlaksana
Lanjutan Pembangunan Jalan MTI Bayua	Belum
Peluasan dan Pengerasan jalan dari Danau ke jalan raya	Terlaksana
Lanjutan pengecoran jalan usaha tani Jorong Jalan Batuang	Terlaksana
Rehab Berat Posyandu Jorong Sawah Rang Salayan	Belum
Rehab Berat Posyandu Jorong Sawah Sungai Rangeh	Belum
Rehab Berat Posyandu Jorong Sawah Banda Tangah	Terlaksana
Pembersihan daerah pinggiran danau	Terlaksana
Pembangunan MCK Mushalla Perguruan Islam	Terlaksana
Pembangunan lanjutan MDA Sungai Rangeh	Terlaksana
Pembangunan MCK Mushalla Al Mukhtar	Belum
Pembangunan Mushalla Kantor	Belum
Pembangunan Tribun Olahraga	Belum

Sumber: Kantor Walinagari Bayua Tahun 2019

Dari tabel diatas ada 13 pembangunan yang dilakukan dimana 6 pembangunan belum terlaksana dan 7 pembangunan sudah terlaksana. Pengawasan BAMUS dalam pelaksanaan pembangunan Nagari perlu dilakukan dengan efektif karena sebagaimana diketahui bahwa fungsi pengawasan merupakan fungsi manajemen yang berkenaan dengan aktivitas atau tindakan untuk mengusahakan atau menjamin pelaksanaan rencana berjalan sesuai yang direncanakan, dan apabila terdapat penyimpangan atau kesalahan akan dapat diketahui seberapa jauh penyimpangan atau kesalahan itu serta apa penyebabnya, dan kemudian diambil tindakan-tindakan korektif atau perbaikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sehubungan dengan uraian di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian di lokasi tersebut dengan maksud untuk mengetahui apakah Badan Musyawarah Nagari di Nagari Bayua Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam sudah melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya dalam mengawasi pemerintah Nagari dalam pelaksanaan pembangunan sudah sesuai atau tidak, serta untuk mengetahui apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh BAMUS Nagari Bayua dalam mengawasi pembangunan Nagari di Nagari Bayua, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam dengan mengambil judul **“Pengawasan Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) Dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Nagari Bayua Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam”**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapatlah diajukan berupa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengawasan Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) Dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Nagari Bayua Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh BAMUS Nagari Bayua dalam mengawasi pembangunan Nagari di Nagari Bayua Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pengawasan Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) Dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Nagari Bayua Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh BAMUS Nagari Bayua dalam mengawasi pembangunan Nagari di Nagari Bayua Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam.

1.4 . Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini secara teoritis bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum umumnya dan hukum tentang pemerintahan nagari khususnya
- b. diharapkan hasil penelitian ini secara teoritis bermanfaat bagi peneliti-peneliti dalam mengembangkan hasil penelitian ini lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini secara praktis bermanfaat bagi Badan Musyawarah Nagari (BAMUS NAGARI) dan Pemerintahan Nagari setempat dalam pengembangan tugas-tugas dimasa yang akan datang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi Badan Musyawarah Nagari (BAMUS NAGARI) dan Pemerintahan Nagari lainnya sebagai bahan pertimbangan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematikan penulisan

BAB II Landasan Teori

Bab ini berisi tentang landasan teori, penelitian pendahuluan, definisi konsep, kerangka pemikiran, dan indicator penelitian

BAB III Metodologi Penelitian

Bab ini berisi uraian lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, subjek dan informan penelitian, serta metode analisis.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pemerintahan Daerah

Menurut (Misdyanti dan Kartasapoetra,1993:17) Pemerintah daerah adalah penyelenggara pemerintah di daerah, dengan kata lain pemerintah daerah adalah pemegang kemudi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah di daerah.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

Tjahja Supriatna (dalam Hanif:2007) yang menyitir pendapat de Guzman dan Taples menjelaskan bahwa unsur-unsur pemerintahan daerah:

- a. Pemerintah daerah adalah subsidi politik dari kedaulatan bangsa dan Negara;
- b. Pemerintah daerah diatur oleh hukum;
- c. Pemerintah daerah mempunyai badan pemerintahan yang dipilih oleh penduduk setempat;
- d. Pemerintahan daerah menyelenggarakan kegiatan berdasarkan peraturan perundangan;
- e. Pemerintah daerah memberikan pelayanan dalam wilayah yurisdiksinya.

Dikaitkan dengan fungsi umum pemerintahan maka unsur-unsur pemerintahan daerah di atas masih ditambah dengan Pemerintah daerah melaksanakan pembangunan daerah dan memberdayakan masyarakat daerah dalam wilayah yurisdiksinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam negara yang berbentuk kesatuan hanya disebutkan pemerintah setempat atau pemerintah Lokal (Local Government) dalam pemerintahan daerah ini, maka Oppenheim(dalam Situmorang dan Sitanggang,1993:19) dalam bukunya yang berjudul “HET NEDERLANDSCH GEMENTE RECHT” memberikan beberapa ciri-ciri dari Pemerintah Daerah yakni :

1. Adanya lingkungan atau daerah batas yang lebih kecil daripada negara.
2. Adanya penduduk dari jumlah yang mencukupi.
3. Adanya kepentingan-kepentingan yang pada coraknya sukar dibedakan dari yang diurus oleh negara, akan tetapi yang demikian menyangkut lingkungan itu, sehingga penduduknya bergerak untuk berusaha atas dasar swadaya
4. Adanya suatu organisasi yang memadai untuk menyelenggarakan kepentingan-kepentingan itu.
5. Adanya kemampuan untuk menyediakan biaya yang diperlukan.

Penyelenggara pemerintahan daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD.Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah.Kepala daerah adalah pimpinan lembaga yang melaksanakan peraturan perundangan. Menurut pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah kepala daerah dibantu oleh seorang wakil kepala daerah, yang masing-masing untuk provinsi disebut wakiil gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati, dan untuk kota disebut wakil walikota.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fungsi pemerintah daerah menurut (Misdyanti dan Kartasapoetra, 1993:20-27) sebagai berikut:

1. Fungsi Otonom

Fungsi otonom dari pemerintah daerah adalah melaksanakan segala urusan yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang lebih tinggi tingkatannya.

2. Fungsi Pembantu

Merupakan fungsi untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan.

3. Fungsi Pembangunan

Fungsi ini untuk meningkatkan laju pembangunan dan menambah kemajuan masyarakat.

4. Fungsi Lainnya

Selain ketiga fungsi diatas terdapat fungsi lainnya adalah sebagai berikut :

- a) Pembinaan Wilayah
- b) Pembinaan Masyarakat
- c) Pemberian pelayanan, pemeriharaan serta perlindungan kepentingan umum.

Otonomi daerah adalah wewenang daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat untuk prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perturan perundang-undangan (Albert 2002:11). .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menurut Haw Widjaja (2002:98) Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari definisi yang disebutkan diatas dapat dilihat bahwa otonomi daerah mengandung arti jumlah atau besarnya tugas, kewajiban, hak dan wewenang serta tanggung jawab urusan pemerintahan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah menjadi isi rumah tangga daerah.

1. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Pasal 1 angka(7) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
3. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
4. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

5. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.2. Konsep Pengawasan

Pengawasan merupakan unsur esensial demi kelangsungan dan pertumbuhan serta keselamatan organisasi bersangkutan. Negara, pemerintah daerah adalah organisasi yang memerlukan manajemen yang baik. Maka mau tidak mau organisasi pemerintah, baik di pusat maupun daerah harus melaksanakan pengawasan dengan baik. Pengawasan bertujuan menemukan sebab dan mengatasi kesalahan atau permasalahan dan kemudian menghilangkan sebab penghambat demi realisasi satu rencana yang ditemukan sebelumnya (B.N. Marbun, 1994: 77).

Charles Simabura (2011: 29) menjelaskan bahwa fungsi pengawasan merupakan kontrol dari pelaksanaan peraturan yang telah dibuat dalam artian menjaga supaya semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan yang telah ditetapkan. Fungsi pengawasan merupakan fungsi yang melekat dalam parlemen. Salamoen dan Nasri (2006: 75) menjelaskan bahwa: "Pengawasan adalah salah satu fungsi organik manajemen yang merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan saran serta tugas-tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijakan, instruksi

dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Pengawasan sebagai fungsi manajemen adalah sepenuhnya tanggung jawab setiap pimpinan pada tingkat manapun.”

G.R Terry dan L.W Rue (1999: 232) menguraikan mengenai definisi pengawasan yaitu: “Pengawasan adalah suatu proses dasar yang serupa saja dimanapun dan apapun yang diawasi. Pengawasan dapat dan seharusnya digunakan untuk meningkatkan hubungan yang menguntungkan dan bersifat positif. Pengawasan adalah dalam bentuk memastikan bahwa apa yang sudah dikerjakan sesuai rencana dan untuk mengantisipasi persoalan menjadi serius.

G.R Terry mengemukakan proses pengawasan sebagai berikut, yaitu:

1. *Determining the standard or basis for control* (menentukan standard atau dasar bagi pengawasan)
2. *Measuring the performance* (ukuran pelaksanaan)
3. *Comparing performance with the standard and ascertaining the difference, if any* (bandingkan pelaksanaan dengan standard dan temukan jika ada perbedaan)
4. *Correcting the deviation by means of remedial action* (perbaiki penyimpangan dengan cara-cara tindakan yang tepat).

Pengawasan pada dasarnya di arahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan di harapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah di tetapkan untuk mencapai tujuan yang telah di rencanakan secara efektif dan efisien. Bahkan melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Setiap pimpinan dalam proses pengawasan tentu mengharapkan semuanya berjalan dengan sempurna. Pengawasan yang dilakukan sebagai bentuk pengukuran kinerja apakah efektif atau tidak. Pengawasan tentu juga memiliki syarat atau ciri yang baik agar pengawasan dapat berjalan lancar. G.R Terry dan L.W Rue (1999: 235) menyebutkan ciri-ciri yang diharapkan dari pengawasan yaitu:

1. Jenis pengawasan harus sejalan dengan persyaratan dari kegiatan.
2. Penyimpangan yang memerlukan koreksi harus segera diidentifikasi.
3. Pengawasan harus sebanding dengan pembiayaannya.

Miriam Budiardjo dan Ibrahim Ambong (1993: 122) juga menjelaskan bahwa fungsi pengawasan dioperasionalisasikan berbeda dibanding lembaga pengawasan fungsional. Legislatif sebagai lembaga politik dalam melakukan pengawasan yang bersifat politis pula. Miriam Budiardjo dan Ibrahim Ambong menambahkan bahwa hak-hak yang dimiliki legislatif seperti hak mengajukan pertanyaan, hak meminta keterangan merupakan bentuk pengawasan oleh legislatif walaupun pada faktanya memerlukan waktu yang cukup panjang dalam prosesnya. Legislatif diberikan kekuasaan untuk memberikan penilaian terhadap kebijakan dan tingkah laku pihak eksekutif dalam menjalankan pemerintahan. Peran legislatif dalam pengawasan sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan penyelewengan yang dilakukan eksekutif.

B.N. Marbun (1994: 77) menguraikan mengenai pengawasan yaitu: "Pengawasan merupakan suatu usaha penertiban untuk menjamin terlaksananya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

segala ketentuan UU, peraturan, keputusan, kebijaksanaan dan ketentuan lain yang telah ditetapkan. Pengawasan bertujuan untuk menemukan sebab dan mengatasi kesalahan atau permasalahan dan kemudian menghilangkan sebab penghambat demi realisasi satu rencana yang ditentukan sebelumnya agar rencana dapat dicapai secara efektif dan efisien.”

Berdasarkan beberapa uraian pengawasan di atas menurut peneliti pengawasan adalah salah satu proses, usaha atau kegiatan yang merupakan salah satu fungsi dari legislatif dalam mengontrol sekaligus menjaga eksekutif agar tidak melakukan tindakan penyalahgunaan serta penyelewangan dalam menjalankan tugasnya. Pengawasan diharapkan dapat menjadi penghambat tindak kecurangan yang dilakukan eksekutif dan pengawasan juga menjadi salah satu usaha untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

2.3. Konsep Pembangunan

Pengertian pembangunan harus kita lihat secara dinamis, dan bukan dilihat sebagai konsep statis. Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir. Proses pembangunan sebenarnya adalah merupakan suatu perubahan sosial ekonomi. Pembangunan agar dapat menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju atau kekuatan sendiri tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Jadi, bukan hanya yang dikonsepskan sebagai usaha pemerintah belaka.

Proses pembangunan menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan (growth plus change) dalam perubahan struktur ekonomi, dari pertanian ke industri atau jasa, perubahan kelembagaan, baik lewat regulasi maupun reformasi kelembagaan. Pembangunan secara berencana lebih



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang. (Subandi: 2011:9-11)

Adapun pembangunan menurut beberapa ahli yaitu : pembangunan menurut Rogers (Rochajat,dkk: 2011:3) adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa. Selanjutnya menurut W.W Rostow (Abdul: 2004:89) pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat terbelakang ke masyarakat negara yang maju.

Pembangunan mula-mula dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara setiap tahunnya. (Rochajat,dkk: 2011:3)

Dalam bidang sosial, usaha-usaha pembangunan pada umumnya diarahkan untuk mengembangkan nilai-nilai dan sikap-sikap dalam masyarakat yang lebih kondusif bagi pembaharuan, pembangunan, pembangunan dan pembinaan bangsa. Dalam hal ini termasuk pengembangan motivasi kegairahan usaha yang bersifat produktif. Dan yang lebih penting adalah dapat dikembangkan suatu proses pendewasaan masyarakat melalui pembinaan dan dorongan serta adanya energi.

Usaha dalam bidang ekonomi ditujukan untuk menambah peralatan modal dan keterampilan agar satu sama lain dapat saling mendukung usaha-usaha dalam peningkatan pendapatan perkapita serta produktivitas perkapita. Pemupukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

modal sangat tergantung pada tabungan dalam negeri, terutama tabungan masyarakat, untuk itu berbagai upaya perlu diupayakan untuk mencapainya. (Subandi: 2011:13)

Selanjutnya Todaro mengatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi ditunjukkan oleh 3 nilai pokok, yaitu:

- a. Berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (*basic needs*),
- b. Meningkatnya rasa harga diri (*self-esteem*) masyarakat sebagai manusia, dan
- c. Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (*freedom from servitude*).

Pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik sekaligus tekat suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin melalui serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi dan institusional, demi mencapai kehidupan yang serba lebih baik. Untuk mencapai “kehidupan yang serba lebih baik” semua masyarakat minimal harus memiliki tiga tujuan inti sebagai berikut (Todaro, 2000: 28) :

- a. Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup yang pokok , seperti pangan , sandang, papan, kesehatan dan perlindungan keamanan.
- b. Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan, yang kesemua itu tidak hanya untuk memperbaiki

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesejahteraan materiil , melainkan juga menumbuhkan jati diri pribadi dan bangsa yang bersangkutan.

- c. Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari belitan sikap menghamba dan ketergantungan, bukan hanya terhadap orang atau negara, bangsa lain, namun juga terhadap setiap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan mereka.

2.4. Badan Permusyawaratan Nagari

Bamus Nagari menurut Peraturan daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Nagari. Bamus berperan sebagai pembantu dari Wali Nagari. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari selanjutnya disingkat APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan BAMUS Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari Pada dasarnya Bamus berfungsi sebagai pembuat Peraturan Nagari yang dirumuskan bersama Wali Nagari Pemerintahan nagari juga dibentuk berdasarkan persetujuan dari BAMUS, pembentukan pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Badan Permusyawaratan yang dulunya Lembaga Musyawarah Desa (LMD) yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggota Badan Permusyawaratan adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan



dengan cara musyawarah dan mufakat. Khusus di Sumatera Barat LMD berubah nama menjadi BAMUS (Badan Musyawarah) Nagari.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Kabupaten Agam No 12 Tahun 2007 pasal 58, adapun tugas dan wewenang BAMUS adalah:

- a. Membahas Rancangan Peraturan Nagari bersama Walinagari;
- b. Melaksanakan Pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Nagari dan pelaksanaan Peraturan Nagari serta Peraturan Walinagari;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Walinagari;
- d. Membentuk Panitia pemilihan Walinagari;
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- f. Menyusun tata tertib BAMUS NAGARI. (BAMUS:2007)

2.5. Pengertian Nagari

Nagari bermakna “kesatuan masyarakat hukum adat”, yaitu adat Minangkabau, dan wilayah *Nagari* adalah wilayah kesatuan masyarakat hukum adat. Sejarah munculnya *Nagari* dimulai dari *Nagari Tuo Pariangan* yang terletak di lereng Gunung Merapi di Kecamatan Pariangan, dimana penduduk pada mulanya mulai mengembara dan mendirikan tempat tinggal menetap yang baru. Dengan tempat tinggal yang menetap tersebut, kemudian dibentuk semacam pemerintahan” (Melinda Noer, Vol. XXII. No. 2, 2004: 245-247).

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari pasal 1 Nagari adalah pertamaan masyarakat hukum adat yang memiliki batas- batas wilayah tertentu berdasarkan filosofi adat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Minangkabau (adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal-usul dan adat salingka nagari.

Istilah Nagari merupakan penyebutan lain dari Desa di Minangkabau. Hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa Penyebutan Desa/ Desa Adat yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyebutannya disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di Daerah setempat. Di Minangkabau, Nagari dapat diumpamakan sebagai sebuah Negara Kecil yang di dalamnya terdapat alat-alat perlengkapan nagari yang di sebut Pemerintahan Nagari. Di sini tugasnya adalah mengatur dan mengurus urusan kenagarian termasuk urusan adat yang merupakan masalah kental dalam masyarakat Minangkabau.

Dari catatan sejarah yang diperkuat oleh *key informan* (pemangku adat dan Walinagari di masa Orde Baru), adat Minangkabau menetapkan persyaratan dibentuknya *Nagari* dalam Undang-undang *Nagari*. Undang- undang pembentukan *Nagari* menetapkan syarat pembentukan nagari dengan tujuan agar ada pengertian yang sama sebagai pedoman pembentukan nagari di tiga *Luhak* Minangkabau. Persyaratan tersebut adalah:

Nagari ba-kaampek suku

Dalam suku babuah paruik

Kampuang ba nan Tuo

Rumah nan ba Tunganai

Syarat pembentukan *Nagari* yang demikian memperlihatkan bahwa dalam satu *Nagari* paling sedikit harus terdiri dari 4 (empat) suku¹⁵ yang berbeda



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

(*Nagari ba-kaampek suku*) yang masing-masingnya dipimpin oleh seorang pemimpin adat “Penghulu Andiko”. Suku yang dibentuk berdasarkan sistim matrilineal¹⁶ (*dalam suku babuah paruik*) menyebabkan seorang pria tidak boleh menikah dengan wanita dari suku yang sama dengannya, sehingga penduduk Nagari baru dapat meneruskan keturunan melalui perkawinan apabila dalam Nagari terjadi pencampuran paling sedikit 4 (empat) suku. Untuk tiap satu keturunan (*saparuik*) tersebut diangkat salah seorang saudara laki-laki tertua atau yang dituakan dari pihak ibu yang dipanggil *Mamak* 17 sebagai *Tuo-Kampuang* (*kampuang ban nan Tuo*). Tugasnya antara lain adalah mengawasi hak kepemilikan sebagai pembantu Penghulu Suku. Sedangkan dalam *satu rumah gadang*, saudara lelaki tertua dari ibu dinamakan dengan *Tungganai* (*Ruman nan ba Tungganai*), yang akan mengurus anak kemenakan dalam *saparuik*. (Melinda Noer, Vol.XXII.No.2, 2004:245-247)

2.6. Sejarah Perkembangan Nagari

Nagari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah wilayah atau sekumpulan kampung yang dipimpin oleh seorang penghulu. Batas-batas wilayah nagari ditentukan oleh alam seperti sungai, hutan, bukit, dan lain sebagainya. Nagari memiliki keistimewaan, tidak sama dengan desa. Nagari merupakan kesatuan adat yang punya wilayah ulayat tersendiri, punya rakyat, anak kemenakan, dan punya struktur pemerintahan secara adat. Pemerintahan Nagari sudah berkembang jauh sebelum Belanda menjajah Indonesia. Di sini juga berlangsung tatanan demokrasi yang lebih tua daripada di Eropa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Naim (2005) setidaknya ada empat pilar bagi tegaknya nagari otonom di era sekarang ini yaitu: *Pertama*, nagari sebagai “unit kesatuan administratif pemerintahan”. Sebagai unit kesatuan administratif pemerintahan, nagari mesti menghidupkan kembali lembaga-lembaga yang mendukungnya sebagai sebuah *republic* miniatur yang mempunyai pemerintah (dalam hal ini Walinagari beserta perangkatnya sebagai eksekutif), BPN/BPAN (sebagai lembaga legislatif yang akan membuat peraturan nagari serta menerima laporan kinerja eksekutif), dan instansi peradilan yang akan menyelesaikan perkara-perkara perdata adat maupun pidana ditingkat nagari (sebagai lembaga yudikatif) yang dulu dilaksanakan oleh Kerapatan Adat Nagari. *Kedua*, nagari sebagai unit kesatuan sosial budaya mengacu pada prinsip “adat salingka nagari” sehingga nagari berwenang mengatur penuh hal-hal yang berkaitan dengan adat, agama dan nilai-nilai serta norma-norma budaya yang mereka miliki. *Ketiga*, nagari sebagai unit kesatuan ekonomi. Karena sifatnya yang otonom nagari harus mampu membiayai dirinya sendiri melalui pemanfaatan aset-aset atau sumberdaya alam yang dimiliki. Hal ini bukan tidak mungkin dapat meminimalisir ketergantungan nagari kepada pemerintah, meskipun bukan berarti sumber-sumber dana dari pemerintah seperti Dana Alokasi Umum Nagari akan ditolak/ diabaikan. *Keempat*, nagari sebagai unit kesatuan keamanan dan pengamanan. Mekanisme inipun sebenarnya bukanlah hal yang baru bagi nagari di Minangkabau, sebab dulu dikenal institusi “*dubalang*” (*hulubalang*) yang berada di bawah komando Walinagari dan memikul tanggungjawab keamanan nagari. Dengan begini polisi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang memang adanya hanya sampai ditingkat Kecamatan saja cukuplah menangani masalah-masalah Kamtibmas yang bersifat lintas nagari.

Sebelum bangsa Belanda menginjakkan kaki di Indonesia, khususnya di wilayah Minangkabau, nagari merupakan sistem pemerintahan yang berdiri sendiri. Tidak ada pemerintahan diatas nagari. Nagari merupakan “republik mini” yang diperintah secara demokratis oleh anak nagari. Dalam pemerintahan nagari, pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum diputuskan berdasarkan pada musyawarah mufakat.

Nagari di Minangkabau lebih dominan pada faktor geneologis (pertalian darah). Beda dengan desa di Jawa yang lebih dilihat dari faktor teritorial (wilayah). Suasana suku lebih terasa di nagari Minang dibanding teritorial. Sungguh pun demikian nagari yang merupakan sub-kultur (budaya khusus) Minangkabau tidak mengabaikan wilayah. Nagari memiliki batas-batas wilayah yang kuat dan ditetapkan dengan sumpah setia moyang ketika nagari baru dibuat.

Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan lembaga kerapatan adat nagari iniak mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako dan pusako yang terjadi dalam masyarakat (Buchari Arma, 2002:39).

Sistem pemerintahan nagari berkembang sejalan dengan sistem demokrasi dan kelarasan serta perubahan yang terjadi di nagari. Faktor kekuasaan dan pemerintahan juga ikut mempengaruhi perkembangan nagari dari masa ke masa.



2.7 Konsep Pengawasan Dalam Islam

Dalam pandangan islam, pengawasan dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Pengawasan dalam islam yaitu:

Kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari keimanan kepada Allah SWT. Seseorang yang yakin bahwa Allah pasti selalu mengawasihamba-hambanya, maka ia akan bertindak hati-hati. Dalam surah Al-Mujadalah, ayat 7 telah di jelaskan bahwa:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ لَهُمْ وَلَا آدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “tidakah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara 3 orang, melainkan Dia-lah keempatnya, dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan dia-lah keenamnya, dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu.” (QS. AL-Mujadalah:7).

2.8 Penelitian Pendahuluan

NO	Peneliti	Tahun	Judul	Metode	Kesimpulan
1	Budiyarto Usman, Salmin Dengo, Very Y.Londa	2014	Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara.	Kualitatif	fungsi pengawasan BPD dalam pelaksanaan pembangunan desa di Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara sudah dilaksanakan dengan baik namun belum maksimal
2	Darmini Roza, Laurensius Arliman S	2017	Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam	Kualitatif	Faktor yang dapat mendukung pengawasan BPD

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa		adalah masyarakat.
3	Neli Yanti	2019	Analisis Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Tanjung Medan Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi	Kualitatif	fungsi BPD dalam membuat dan menetapkan peraturan desa bersama kepala desa dapat dikatakan cukup baik.

2.9. Defenisi Konsep

1. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pengawasan bertujuan menemukan sebab dan mengatasi kesalahan atau permasalahan dan kemudian menghilangkan sebab penghambat demi realisasi satu rencana yang ditemukan sebelumnya
3. Pembangunan adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa.
4. Bamus Nagari adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Nagari. Bamus berperan sebagai pembantu dari Wali Nagari.
5. *Nagari* bermakna “kesatuan masyarakat hukum adat”, yaitu adat Minangkabau, dan wilayah *Nagari* adalah wilayah kesatuan masyarakat hukum adat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

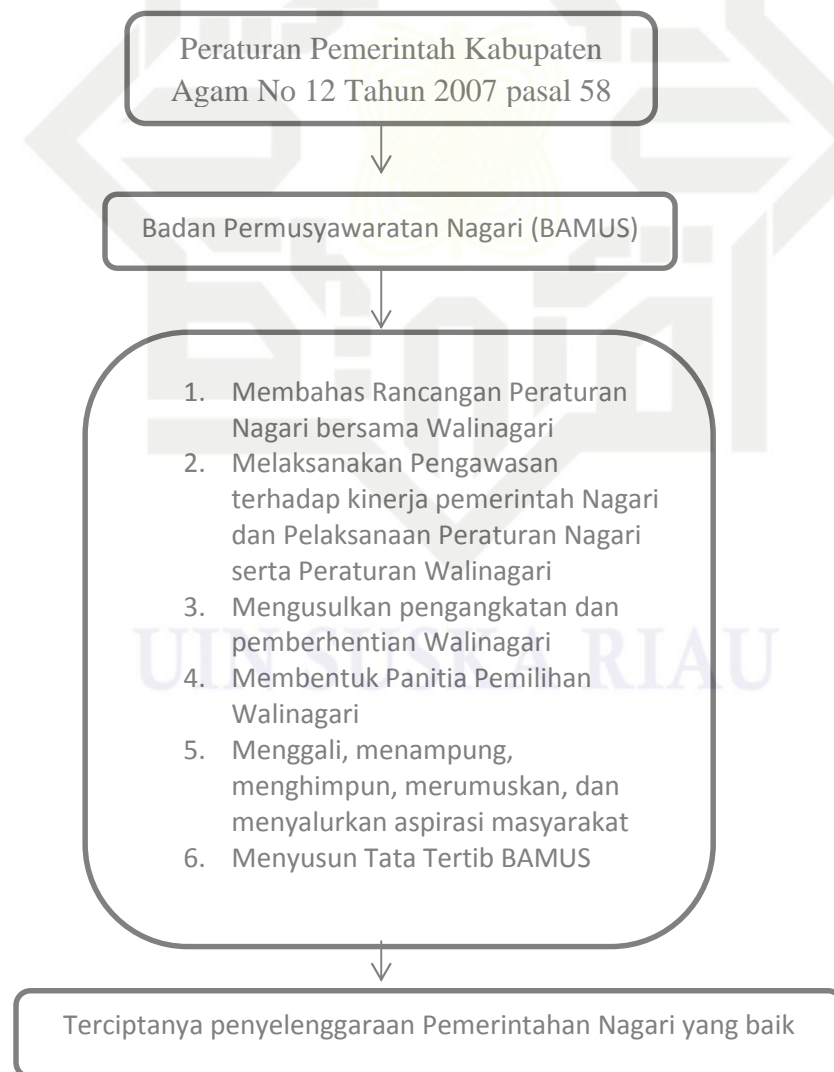
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintahan Nagari merupakan sebuah pemerintahan tradisional yang diperintah oleh penghulu-penghulu suku yang memiliki kewenangan yang sama derajatnya yang tergabung dalam sebuah kerapatan adat.

2.10. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran Pelaksanaan Kewenangan Badan Musyawaratan Nagari (Bamus) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari pada Nagari Bayua Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2.11. Indikator Penelitian

Konsep	Indikator	Sub Indikator
Tugas dan wewenang BAMUS, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Kabupaten Agam No 12 Tahun 2007 pasal 58	Melaksanakan Pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Nagari dan pelaksanaan Peraturan Nagari serta Peraturan Wali nagari;	1. Mengawasi pelaksanaan pembangunan yang diprogramkan di nagari 2. Mengukur pelaksanaan peraturan yang dibuat bersama wali nagari
	Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat;	1. Bagaimana menerima masukan atau saran dari masyarakat. 2. Mencatat semua aspirasi masyarakat. 3. Bagaimana cara menindak lanjuti aspirasi dari masyarakat.

Sumber: Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) di Nagari Bayua Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam karena terkait dengan Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) dimana kurangnya partisipasi dan kontribusi yang memuaskan bagi masyarakat dan pemerintah nagari. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2020 sampai dengan Maret 2020.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang menggambarkan suatu keadaan atau penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel yang satu dengan variabel yang lain.

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

3.2.1 Data Primer

Data Primer yaitu data yang didapatkan dari hasil penelitian secara langsung yang bersumber dari responden, berupa informasi dan wawancara.

3.2.2 Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diambil dari tempat penelitian yang sifat data tersebut sudah dipublikasikan atau diolah sebelumnya, tentang demografi Nagari Bayua.



3.3. Metode Pengumpulan Data

Yaitu terdiri dari 3 macam, Yaitu:

3.3.1. Studi Dokumen

Yaitu penulis mempelajari dan mengumpulkan bahan-bahan melalui kepustakaan dan literatur-literatur yang ada dan berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3.3.2. Observasi

Yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.

3.3.3. Wawancara

Yaitu dimana penulis dalam melakukan teknik pengumpulan data ini untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan dengan mendatangi Masyarakat dan juga Kantor Walinagari Bayua Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam dan melakukan wawancara dengan sifat semi struktur dengan para perangkat nagari serta Wali Nagari Bayua Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam.

3.4. Informan Penelitian

Subjek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Sebagaimana dijelaskan oleh Arikunto (2004: 145) subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Jadi, subjek penelitian itu merupakan sumber informasi yang digali untuk mengungkap fakta-fakta lapangan. Berdasarkan penjelesa

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut, maka penentuan subjek penelitian digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan secara jelas dan mendalam.

Selanjutnya, penentuan subjek penelitian atau responden dilakukan dengan cara *purposive sampling*. Seperti yang dikemukakan oleh sugiyono (2010: 85) bahwa, teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan sengaja dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Sehingga akan memudahkan peneliti dalam menelusuri situasi yang diteliti.

Informan dalam penelitian kualitatif informasi penelitian yang memahami informasi tentang objek penelitian. informasi yang dipilih harus memiliki kriteria agar informasi yang didapatkan bermanfaat untuk penelitian yang dilakukan. Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moelong 2000 : 1997). Dalam penelitian ini terdapat 2 informan yaitu:

1. Informan Key (*Key Informan*)

Key Informan adalah orang-orang yang sangat memahami permasalahan yang diteliti. Dengan daftar *Key Informan* sebagai berikut:

Tabel 3.4.1
Daftar Informan Penelitian

NO	Informan	Jumlah
1	li Nagari	1
2	retaris Nagari	1
3	si Kesejahteraan	1
4	ua Bamus	1
5	retaris Bamus	1
6	ggota Bamus	1
Jumlah		6

Sumber: Data Olahan Tahun 2019

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Informan Pelengkap

Informan pelengkap adalah orang yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti, adapun yang akan menjadi informan pelengkap dari penelitian ini ialah Masyarakat Nagari Bayua Kecamatan tanjung Raya Kabupaten Agam.

NO	Uraian	Jumlah
1	Tokoh Masyarakat	2
	Jumlah	2

Sumber: Data Olahan Tahun 2019

3.5. Metode Analisis

Penelitian ini berbentuk kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Jadi peneliti menggunakan analisa data deskriptif yaitu suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci mengenai pengawasan BAMUS dalam penyelenggaraan pembangunan di Nagari Bayua Kecamatan tanjung Raya Kabupaten Agam.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

4.1 Sejarah Nagari Bayua

Menurut riwayat yang dipercaya di Minangkabau, tatkala alam Minangkabau belum bernegeri, nenek moyang pada dahulunya bertempat di puncak gunung Merapi yang merupakan sebuah pulau. Begitu pula dengan yang masih berbentuk hutan belukar sampai pada abad ke-17 berdatanglah orang-orang yang menurut sejarah ada hubungan dari Pagaruyung dengan mendirikan teratak-teratak kemudian menjadi dusun akhirnya menjadi kampung.

Pada waktu penjajahan Belanda mengembangkan daerah penjajahannya sampai ke wilayah Minangkabau, kemudian mendirikan sebuah pemerintahan dengan menggabungkan seluruh kampung dan penghulu, kemudian mengangkat seorang Penghulu Kepala dengan syarat harus dari keturunan Raja Minangkabau. Untuk pemilihan ini dilaksanakan disuatu tempat yang kebetulan banyak tumbuh pohon Kayu Bayur (tempatnya di Lubuk Gadang) maka inilah asal nama Nagari Bayua .

Nagari Bayua merupakan salah satu Nagari yang berada di Kecamatan Tanjung Raya yang sejak dahulu kehidupan berdemokrasi telah ada, di dimana telah diadakannya Pemilihan Kepala Desa tahun 1952 dan pada tahun 2002 dimulainya pemilihan Wali Nagari (Babaliak Ka Nagari).

Nagari bayua juga merupakan Nagari yang mempunyai daerah kedua terluas di Kecamatan Tanjung Raya yang memiliki 10 Jorong yakni Jorong Kampung Jambu, Jorong Sungai Rangeh, Jorong Panji, Jorong Jalan Batuang, Jorong Sawah Rang Salayan, Jorong Pincuran Tujuh, Jorong Lubuak Kandang, Jorong Banda Tangah, Jorong Lubuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anyia, Jorong Kapalo Koto, di Nagari Bayua terdapat 44 penghulu dengan kebesaran gelar –gelar yang sampai sekarang menjadi pusaka turun menurun terdiri dari 6 (enam) pesukuan yaitu Suku Guci, Pili, Caniago, Tanjung, Koto dan Melayu. (Sumber: Kantor Walinagari Bayua Tahun 2019)

4.2. Keadaan Wilayah

4.2.1 Letak

Nagari : Bayua
 Kecamatan : Tanjung Raya
 Kabupaten : Agam
 Provinsi : Sumatera Barat

4.2.2 Batas

Sebelah Utara : Nagari II Koto
 Sebelah Selatan : Nagari Maninjau
 Sebelah Barat : Danau Maninjau
 Sebelah Timur : Kecamatan Pelambayan & Kecamatan Matua

4.2.3 Luas Wilayah

Nagari Bayua memiliki luas $\pm 4.528,6$ Ha yang membentang dari utara sampai selatan lingkaran danau Maninjau dan sampai daerah perbukitan Dalko. Nagari Bayua memiliki **10 Jorong** dengan luas per Jorongnya:

Tabel 4.2.1
Jorong Di Nagari Bayua

NO	TERDIRI DARI JORONG	LUAS (Ha)	Keterangan
1	Kampung Jambu	± 602.7	
2	Sungai Rangeh	± 631.4	
3	Panji	± 360.8	
4	Jalan Batuangs	± 431.6	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5	Sawah Rang Salayan	±624.7	
6	Kapalo Koto	± 462.4	
7	Pincuran Tujuh	± 522.5	
8	Lubuak Kandang	±257.4	
9	Lubuak Anyia	± 283.6	
10	Banda Tengah	± 351.5	
Jumlah		± 4.528,6	

Sumber: Kantor Walinagari Bayua Tahun 2019

4.2.4 Bentuk Tanah

Dilihat dari keadaan wilayahnya, Nagari Bayua bisa di bagi menjadi beberapa bentuk daerah, yaitu daerah Perbukitan, Pantai, Bukan Pantai dan Kepulauan.

4.2.5 Kondisi Geografis

Dari Sisi Geografisnya Nagari Bayua memiliki ketinggian 500-1000 meter dari Permukaan Laut dengan Keadaan Suhu rata-rata 35° C. Nagari Bayua memiliki relief alam perbukitan dan pantai yang membentang sepanjang tepian danau maninjau sampai areal perbukitan dengan iklim subtropisnya Nagari Bayua memiliki hutan heterogen, berbagai jenis tanaman yang hidup didalamnya dan Nagari Bayua memiliki dua musim utama yaitu musim hujan dan musim panas.

4.2.6 Luas Menurut Pemanfaatan Lahan

Tabel 4.2.2
Luas Menurut Pemanfaatan Lahan

NO	JUMLAH PENGGUNAAN TANAH	JUMLAH (Ha)	KETERANGAN
1	Perumahan dan Pekarangan (Pemukiman)	±140,5	
2	Sawah –Teknis	-	
	- ½ Teknis	±523,5	
3	Perkebunan rakyat	±435	
4	Pertanian tanah kering dan ladang tegalan	±100	
5	Danau	± 1200	
6	Tebat / Tambak / Kolam	± 75.1	

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7	Tanah Tandus / Kritis	-	
8	Padang Ilalang / Tempat gembala	-	
9	Tempat rekreasi dan Olah Raga:	± 1.5	
	- Sepak bola, Volly, Tenis, Bulu Tangkis	± 1	
	- Golf	-	
10	Jalan Raya (Negara, Propinsi, Kabupaten, Nagari)	± 10	
11	Hutan	± 8	
12	Dan lain-lain	692	

Sumber: Kantor Walinagari Bayua Tahun 2019

4.2.7 Orbitasi Waktu Tempuh

Nagari Bayua terletak di daerah yang cukup strategis dan mudah dijangkau melalui perhubungan darat dan air, orbitasi waktu tempuh dari Nagari Bayua menuju Ibu Kota Propinsi, Ibu Kota Kabupaten, Ibu Kota Kecamatan dan Pusat Fasilitas terdekat.

Tabel 4.2.3
Orbitasi Waktu Tempuh

No	Orbitasi dan Waktu Tempuh	Keterangan
1.	Jarak ke Ibu Propinsi	120 Km
2.	Jarak ke Ibu Kabupaten	27 Km
3.	Jarak ke Ibu Kecamatan	5 Km
4.	Waktu Tempuh ke Ibu Propinsi	4 Jam
5.	Waktu Tempuh ke Ibu Kabupaten	45 menit
6.	Waktu Tempuh ke Ibu Pusat Fasilitas terdekat (ekonomi,kecamatan,pemerintah)	¼ Jam

Sumber: Kantor Walinagari Bayua Tahun 2019

4.3. Kependudukan

4.3.1 Jumlah Penduduk

Nagari Bayua dengan wilayah yang sangat besar juga memiliki Jumlah Penduduk yang juga besar, jumlah penduduk secara keseluruhan adalah **6179 Jiwa** dengan jumlah kepala keluarga sebanyak **1710 KK** Yang tersebar semenjak dari Jorong Kampung Jambu, Jorong Sungai Rangeh,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jorong Panji, Jorong Jalan Batuang, Jorong Sawah Rang Salayan, Jorong Pincuran Tujuh, Jorong Lubuak Kandang, Jorong Banda Tangah, Jorong Lubuk Anyia, Jorong Kapalo Koto.

Tabel 4.3.1
Nama – nama Jumlah KK , Jumlah Jiwa di Nagari Bayua

NO	NAMA JORONG	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA
1	2	3	5
1	Kampung Jambu	144	509
2	Sungai Rangeh	293	1086
3	Panji	98	352
4	Jalan Batuang	96	348
5	Sawah Rang Salayan	169	582
6	Kapalo Koto	215	773
7	Lubuak Anyia	179	671
8	Banda Tangah	150	498
9	Lubuak Kandang	203	735
10	Pincuran Tujuh	163	625
	JUMLAH	1710	6179

Sumber: Kantor Walinagari Bayua Tahun 2019

4.3.2 Mata Pencaharian Penduduk

Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa Nagari Bayua merupakan daerah dengan bentuk alam perbukitan dan danau, maka mata pencaharian utama masyarakat Nagari Bayua adalah bidang Pertanian/ Perkebunan, Perikanan, peternakan dan Perdagangan/Jasa.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3.3. Sektor Pertanian dan Perkebunan

Adapun jumlah Petani dan Pekebun yang ada sebagai berikut:

Tabel 4.3.2
Jumlah Petani dan Pekebun

NO	STATUS	JUMLAH (ORG)	JENISNYA
1	Pemilik Tanah/Sawah	434	Sawah
2	Penyewa / penggarap	373	Kebun/Ladang
3	Buruh tani	141	Kebun/Ladang

Sumber: Kantor Walinagari Bayua Tahun 2019

Tabel 4.3.3
Sarana teknologi Pertanian

No	Uraian	Jumlah
1	Gilingan Padi	3 Buah
2	Mesin Bajak / Garu	15 Buah
3	Perontok Padi	18 Buah

Sumber: Kantor Walinagari Bayua Tahun 2019

4.3.4. Sektor Perikanan

Data jumlah pemilik *Pembudidaya ikan* di Nagari Bayua Tahun 2019

Tabel 4.3.4
Jumlah Pembudidaya Ikan

No	Jorong	Pembibitan	KJA
1	Kampung Jambu	15	14
2	Sungai Rangeh	103	21
3	Panji	8	3
4	Jalan Batuang	18	4
5	Sawah Rang Salayan	5	1
6	Kapalo Koto	32	21
7	Pincuran Tujuh	18	165
8	Lubuak Kandang	12	173
9	Banda Tengah	15	30
10	Lubuak Anyia	25	250
	Jumlah	251	682

Sumber: Kantor Walinagari Bayua Tahun 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3.5. Sektor Peternakan

Tabel.4.3.5
Jumlah Peternak

NO	STATUS	JUMLAH (ORG)	JUMLAH (EKOR)
1	Peternak Sapi	80	224
2	Peternak Kambing	4	38
3	Peternak Ayam	180	1893
4	Peternak Itik	2	1380
5	Peternak Kerbau	28	58
6	Peternak Puyuh	1	8000
	Jumlah	295	11593

Sumber: Kantor Walinagari Bayua Tahun 2019

4.3.6. Sektor Perdagangan/Jasa

Sektor Perdagangan dan Jasa yang ada di Nagari Bayua lebih banyak kepada:

Tabel 4.3.6
Jumlah Penduduk Di Sektor Perdagangan/ Jasa

NO	STATUS	JUMLAH (ORANG)
1	Jasa Pemerintah / Non Pemerintah	
	a. PNS	
	1. Pegawai Negeri Sipil Non Guru	30
	2. PNS Guru	50
	3. Karyawan Honorer	68
	4. Mantari Kesehatan / Perawat	-
	5. Bidan	4
	6. TNI	4
	7. POLRI	4
2	Jasa Lembaga-lembaga Keuangan	
	a. Perbankan	-
	b. Koperasi (Simpan Pinjam)	-
3	Jasa Perdagangan	
	a. Pasar Nagari	1
	b. Warung	70
	c. Kios	40
	d. Pedagang Pasar Harian/Mingguan	51
4	Jasa Komunikasi dan Angkutan	
	a. Angkutan Tak Bermotor	-
	b. Angkutan Sepeda Motor	510
	c. Mobil Kendaraan Umum	10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	d. Wartel	-
5	Jasa Keterampilan	
	a. Tukang / Batu / Kayu	134
	b. Tukang Jahit	6
	c. - Tukang Cukur	5
	- Salon	3

Sumber: Kantor Walinagari Bayua Tahun 2019

4.3.7. Pendidikan Dan Angkatan Kerja**4.3.7.1. Pendidikan**

Tabel 4.3.7
Prasarana pendidikan

NO	URAIAN	JUMLAH
1	PAUD	1 Buah
2	TK	2 Buah
3	SD	6 Buah
4	SLTP	3 Buah
5	SLTA / MA	1 Buah

Sumber: Kantor Walinagari Bayua Tahun 2019

4.3.8. Angkatan Kerja

Angkatan kerja merupakan Sumber Daya Manusia yang berada di Nagari Bayua , namun masih banyak angkatan kerja yang dimiliki belum memiliki kualitas yang cukup, dalam arti kata banyak dari angkatan kerja di Nagari Bayua merupakan orang-orang yang putus sekolah dan bahkan masih ada yang buta aksara. Jumlah Angkatan kerja yang ada di Nagari Bayua adalah:

Tabel 4.3.8
Jumlah Angkatan Kerja

NO	ANGKATAN KERJA	JUMLAH (ORANG)
1	Penduduk Usia Kerja Tetap	1824
2	Penduduk Usia Kerja Yang Bekerja Tidak Tetap	2343
3	Penduduk Usia Kerja Yang Tidak Bekerja	512

Sumber: Kantor Walinagari Bayua Tahun 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan jumlah Angkatan Kerja dirinci menurut tingkat pendidikannya adalah:

Tabel 4.3.9
Jumlah Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan

No	PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)
1	Buta Aksara dan Angka	25
2	Tidak Tamat SD	568
3	Tamat SD	1125
4	Tamat SLTP	1426
5	Tamat SLTA	1610
6	Tamat Akademi (D1 – D3)	643
7	Sarjana :	
	S1	105
	S2	95
	S3	-
	Jumlah	5597

Sumber: Kantor Walinagari Bayua Tahun 2019

4.3.9. Sosial Kemasyarakatan Dan Budaya

Nagari Bayua merupakan Nagari yang mempunyai kehidupan yang terus berkembang seiring meningkatnya perekonomian masyarakatnya. Ini dapat dilihat dari tata cara kehidupan masyarakat yang sudah tidak tertinggal lagi, masyarakat yang benar-benar miskin sudah bisa di katakan menurun.

4.3.9.1. Budaya dan Adat Istiadat

Nagari Bayua mengenal prinsip “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*” dengan berpegang teguh pada prinsip tersebut roda Pemerintahan Nagari di jalankan, dalam kehidupan bermasyarakat, Masyarakat Nagari Bayua tidak terlepas dari Norma Adat dan Norma Agama. Masyarakat Nagari Bayua juga memegang teguh prinsip dari Dt. Parapatiah Nan Sabatang yaitu “*Kamanakan Barajo Ka Mamak, Mamak*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barajo Ka Pangulu, Pangulu Barajo Ka Mupakaik” Yang berarti keputusan tertinggi yang ada di Nagari Bayua adalah Mufakat, setiap permasalahan yang timbul dalam masyarakat selalu diselesaikan dengan cara Mufakat, main hakim sendiri bukanlah gaya hidup Orang Minang pada umumnya dan Khususnya Nagari Bayua (*Sumber Kantor Wali Nagari Bayua*).

Masyarakat Nagari Bayua masih melestarikan upacara-upacara adat yang sudah ada secara turun temurun, seperti:

- Adat turun mandi bagi anak yang baru lahir
 - Adat Aqikah
 - Adat Sunat Rasul
 - Adat Nikah Kawin
 - Adat Batagak Gadang/Batagak Pangulu pada saat pengangkatan Penghulu
- Adat yang baru

Selain itu ada juga yang disebut dengan “**Permainan Anak Nagari**” yaitu budaya kesenian yang tetap ada walaupun dalam gejolak arus globalisasi sekarang ini.

- Kesenian *tambur/gandang*
- Kesenian *randai*
- Kesenian *silek* / Pencak Silat
- Kesenian Tari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3.10. Kesehatan Masyarakat

Tabel 4.3.10
Jumlah Bidan di Nagari Bayua

No	Nama Bidan	Pustu	Alamat	Keterangan
1.	Mariati Marina	-	Lubuak Anyia	Bidan Desa
2.	Lenny Soviza	-	Kapalo Koto	Bidan Desa
3.	Yengki Amna	-	Lubuak Anyia	Bidan Desa
4.	Desi Novriza	✓	Lubuak Anyia	Bidan Desa
5.	Amelia Idrus	✓	Jalan Batuang	Bidan Desa

Sumber: Kantor Walinagari Bayua Tahun 2019

4.3.11. Posyandu

Selain memiliki bidan desa Nagari juga mempunyai Kader Posyandu, yaitu orang-orang yang ditunjuk untuk membantu Nagari dalam pembinaan kesehatan masyarakat Nagari.

4.3.12. Pemuda Dan Olah Raga

Sarana dan prasarana olah raga yang ada di Nagari Bayua adalah:

Tabel 4.3.11
Sarana dan Prasarana Olah Raga di Nagari Bayua

No	Sarana Olah Raga	Jumlah	Lokasi
1	Lapangan Sepak Bola	1	Jorong Panji
2	Lapangan Bola Volley	2	Jorong Sungai Rangeh Jorong Kampung Jambu
3	Lapangan Bulu Tangkis	-	-
4	Tenis Meja	-	-
5	Lapangan Sepak Takraw	-	-
6	Kolam Renang	-	-
7	Lapangan Futsal	1	Jorong Pincuran Tujuh

Sumber: Kantor Walinagari Bayua Tahun 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3.13. Bidang Keagamaan

Dalam bidang Agama Nagari Bayua termasuk salah satu Nagari yang paling menonjol, seiring dengan pepatah Minangkabau yang telah menjadi prinsip umum Adat Istiadat Minang itu sendiri yaitu “**Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah**”. Yang telah menjadikan Nagari Bayua menjadi Nagari yang Agamais :

Tabel 4.3.12
Nama – Nama tempat Ibadah yang ada di Nagari Bayua

No	Nama Sarana	Nama Jorong
1	Mesjid Nurul Iman	Kampung Jambu
2	Mushala Guguak Panjang	Kampung Jambu
3	Mushala Sirantiah	Kampung Jambu
4	Mesjid Istiqamah	Sungai Rangeh
5	Mushala Nurul Ikhlas	Sungai Rangeh
6	Mushala Khairul Mukminin	Sungai Rangeh
7	Mushala Subulusalam	Sungai Rangeh
8	Mushala Taqwa Muhammadiyah	Sungai Rangeh
9	Mushala Simp Ateh	Sungai Rangeh
10	Mushala Alkhairat	Sungai Rangeh
11	Mesjid Mutmainah	Panji
12	Mushala Sampia	Panji
13	Mushala Al-Muktar	Jalan Batuang
14	Mushalla Darusalam	Jalan Batuang
15	Mesjid Nurul Huda	Sawah Rang Salayan
16	Mushalla Al-Huda	Sawah Rang Salayan
17	Mushalla Surau Gadang	Sawah Rang Salayan
18	Mushalla An-Nur	Sawah Rang Salayan
19	Mushala Surau Pinteh	Sawah Rang Salayan
20	Mushalla Simpang Tigo	Sawah Rang Salayan
21	Mushalla Al-Muchlisin	Pincuran Tujuh
22	Mushalla Perguruan Islam	Lubuak Kandang
23	Mushalla A'isyiah	Lubuak Kandang
24	Mushalla Al-Kautsar	Lubuak Kandang
25	Mushalla Al-Whusta	Banda Tangah
26	Mushalla Nurul Abyad	Lubuak Anyia
27	Mushalla Al Kahfi	Lubuak Anyia
28	Mushalla Al Ikhlas	Lubuak Anyia
29	Mesjid Raya Bayua	Kapalo Koto

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

30	Mushalla Surau Gadang	Kapalo Koto
31	Mushalla Surau Tinggi	Kapalo Koto
32	Mushala Muhammadiyah	Pincuran Tujuh

Sumber: Kantor Walinagari Bayua Tahun 2019

Selain beribadah masyarakat nagari Bayua juga sering mengadakan kegiatan keagamaan lainnya seperti:

- Pengajian rutin ibu-ibu setiap hari Jum'at
- Pengajian Yasin dan Tafsir Al-Qur'an
- Pengajian Remaja
- Dan perayaan hari-hari keagamaan lainnya yang diperingati dengan mengadakan tabligh akbar.

4.4 Pemerintahan Nagari Dan Lembaga-Lembaga Nagari

4.4.1 Pemerintahan Nagari

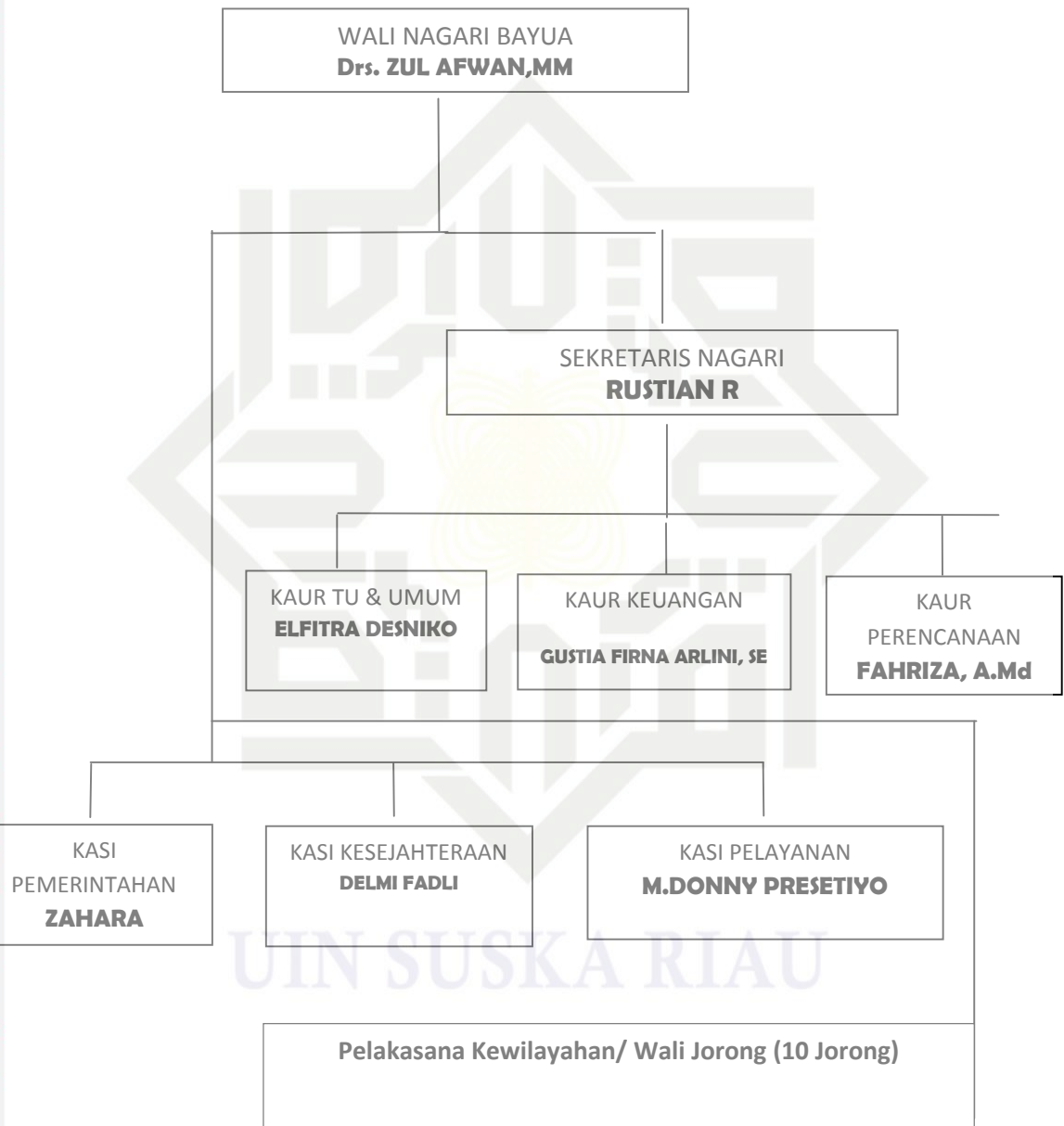
Nagari merupakan Pemerintahan terendah di Negara Indonesia. Nagari dipimpin oleh seorang Wali Nagari yang dipilih melalui Pemilihan Umum oleh seluruh masyarakat Nagari sendiri, seorang Wali Nagari memimpin beberapa anak Nagari yang disebut dengan **Pelaksana Kewilayahan / Wali Jorong** dan dalam menjalankan roda pemerintahan Wali Nagari dibantu oleh Sekretaris Nagari, Kaur Keunagan, Staf Nagari dan 3 (tiga) orang Kepala Seksi / Kasi atau 2 (dua) orang Kepala Urusan / Kaur yang mempunyai bidang-bidang tersendiri serta Wali Jorong yang memimpin setiap Jorong yang ada di Nagari tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Struktur Pemerintahan Nagari

Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Nagari Bayua :



Sumber: Kantor Walinagari Bayua Tahun 2019



Tabel 4.4.1
DAFTAR NAMA WALI NAGARI, SEKRETARIS DAN PERANGKAT
TAHUN 2019

No	Nama	Tempat / Tgl Lahir	Pendidikan	Jabatan
1	Drs. ZUL AFWAN, MM	Bayur, 24-05-1954	S.2	Wali Nagari
2	RUSTIAN R	Bukittinggi, 27-02-1968	SMA	Sekretaris
3	GUSTIA FIRNA ARLINI, SE	Padang, 20-08-1978	S.1	Kaur Keuangan
4	M.DONNY PRASETIYO	Jakarta, 14-01-1993	SLTA	Kasi Pelayanan
5	FAHRIZA, Amd	Bireuen, 12-04-1985	D3	Kaur Perencanaan
6	ZAHARA, SH	Pagar Alam, 28-02-1992	S.1	Kasi Pemerintahan
7	ELFITRA DESNIKO	Bayua, 21-09-1987	S.1	Kasi TU dan Umum
8	DELMY FADLI	Bayua, 21-12-1985	MAN	Kasi Kesejahteraan
9	ZULFAHMI	Tebing Tinggi, 20-02-1965	SMA	Wali Jorong Jalan Batuang
10	PUSPA ANGRAINI	Bayua, 28-05-1993	S.1	Wali Jorong SWR
11	AZWIR	Bayua, 15-03-1966	SMA	Wali Jorong Banda Tangah
12	HENDRA	Bayua, 11-09-1969	SMA	Wali Jorong Pincuran Tujuh
13	MUHAMMAD ARBI	Bayua, 14-10-1974	MAN	Wali Jorong Lubuak Anyia

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14	DEDI SAPUTRA	Bukittinggi, 31-05-1974	SMA	Wali Jorong Panji
15	AKBAR DANI PUTRA	Bayua, 31-07-1987	SMA	Wali Jorong Kapalo Koto
16	HADI FAJRIN, SHI	Bayua, 02-05-1985	S.1	Wali Jorong Lubuak Kandang
17	ROMA FEBRIANTO, S.Kom	Bayua, 08 Januari 1992	S.1	Wali Jorong Kampung Jambu
18	M. YUNAN	Bayua, 23-09-1972	SLTP	Wali Jorong Sungai Rengeh

Sumber: Kantor Walinagari Bayua Tahun 2019

4.4.2 LEMBAGA-LEMBAGA NAGARI

4.4.2.1 Badan Musyawarah (BAMUS)

Bamus merupakan lembaga permusyawaratan yang ada di sebuah nagari dan juga sebagai jembatan aspirasi masyarakat dalam membangun nagari, karena setiap anggota Bamus merupakan perwakilan dari masyarakat. Nagari Bayua memiliki **9 (sembilan) orang** anggota Bamus (profil terlampir), yang ikut bekerjasama dengan Wali Nagari dalam membangun sebuah Nagari.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.4.2
Struktur Kepengurusan BAMUS

NO	N A M A	JABATAN
1	ANTONI, S.Pd	KETUA
2	H. DJ B DT PAMUNCAK	WAKIL KETUA
3	DESI FITRIA	SEKRETARIS
4	H.YE.IMAM PANJANG	ANGGOTA
5	YUSRI DT. RAJO BULAN	ANGGOTA
6	S. DT. NAN BARENO	ANGGOTA
7	SYAHENDRA BUANA	ANGGOTA
8	NOVRIDA	ANGGOTA
9	DEDI SUMANTO	ANGGOTA

Sumber: Kantor Walinagari Bayua Tahun 2019

4.4.2.2 Kerapatan Adat Nagari (KAN)

KAN adalah lembaga Nagri yang bergerak dalam bidang adat istiadat, anggota KAN merupakan kumpulan dari “*Niniak Mamak, Imam Kahtib dan Cadiak Pandai*” yang ada di nagari tersebut. Nagari Bayua memiliki 44 orang anggota KAN. itu tersebar di seluruh Nagari Bayua , ini karena Masyarakat Minangkabau menganut sistem *matrilineal* yaitu garis keturunan ibu, maka beberapa penghulu yang mempunyai isteri bukan berasal dari Nagari Bayua walaupun dia sendiri asli berasal dari Nagari Bayua berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.4.3**Badan kepengurusan KAN (Kerapatan Adat Nagari)**

No	Nama	Jabatan
1	Drs.H.MM.Dt Rajo Lelo	Ketua
2	H.YE.Imam Panjang	Wakil Ketua
3.	ZN.Khatib Sulaiman	Sekretaris
4.	H.Muhammad Husni Yusuf Imam Bagindo	Bendahara

Sumber: Kantor Walinagari Bayua Tahun 2019

4.4.2.3 Lembaga Pemberdayaan Pembangunan (LPMN)

LPMN adalah lembaga kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang pembangunan Nagari, segala hal yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan Nagari merupakan tugas dan tanggung jawab dari LPMN, mulai dari mencari sumber dana sampai pada pelaksanaan pembangunan, LPMN bekerjasama dengan Kepala Urusan Pembangunan di Nagari. Nagari Bayua sendiri memiliki **9 (Sembilan) orang** anggota LPMN yang sekarang masih aktif dalam pembangunan Nagari.

4.4.2.4 TIM Perumus (TIM Sebelas) Rencana Pembangunan JangkaMenengah (RPJM)

Rencana Pembangunan Nagari (RPJM) adalah dokumen perencanaan komprehensif Enam Tahunan yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan Pemerintah Nagari.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan yang harus disiapkan baik di Tingkat Nasional maupun di Tingkat Daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintahan, maka berikut ini adalah paparan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam tahun 2010-2016.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2010-2016 ini dirumuskan dalam Visi Misi arah kebijakan dan rencana program Pemerintahan Nagari Bayua. Nagari Bayua sendiri memiliki **TIM Perumus (TIM Sebelas)** yang memiliki **11 (Sebelas)** orang anggota RPJM yang sekarang masih aktif dalam pembangunan Nagari berikut.

4.4.2.5 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

PKK merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang kesejahteraan keluarga, lembaga ini di ketuai oleh isteri dari wali nagari sendiri, kegiatan umum yang di lakukan oleh PKK adalah Posyandu, Keluarga Berencana, Kegiatan Nagari Siaga dan kegiatan yang berhubungan dengan kesejahteraan keluarga lainnya. Anggota PKK yang ada di Nagari Bayua adalah sebanyak **40 orang** terdiri dari ibu Wali Nagari dan Wali Jorong, Kader Posyandu dan BKB, serta bidan desa atau Bidan Nagari.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.4.2.6 Bundo Kandung

Merupakan isteri dari pemuka-pemuka adat di Nagari

4.4.2.7 Lembaga-Lembaga Lainnya

Lembaga-lembaga lainnya yang ada di nagari Bayua antara lain adalah:

- **Karang Taruna** bekerja dalam bidang kepemudaan
- **TKPK Mesjid** bekerja dalam bidang pengentasan kemiskinan di Nagari yang berbasis Mesjid.
- **TKPK Nagari** bekerja dalam bidang pengentasan kemiskinan di Nagari.
- **TKPK Jorong** bekerja dalam bidang pengentasan kemiskinan di Jorong



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan mengenai Pengawasan Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) Dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Nagari Bayua Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan BAMUS dalam pembangunan masih kurang optimal, karena pada saat pembangunan berlangsung BAMUS tidak ada yang turun kelapangan walaupun hanya sekedar pengecekan ke lokasi pembangunan tersebut, yang membuat pengawasan belum dilakukan secara detail, hal ini dikarenakan juga karena setiap anggota memiliki kesibukan pada pekerjaan utama mereka, inilah yang menyebabkan masih kurang optimal pengawasan BAMUS dalam hal pembangunan, dengan adanya pengawasan yang maksimal maka rencana pembangunan di desa atau nagari akan berhasil.
2. kurangnya sosialisasi BAMUS kepada masyarakat terhadap fungsinya yang diembannya, sehingga masyarakat kurang mengetahui pentingnya partisipasi mereka dalam hal pembangunan sehingga secara tidak langsung kurang terlaksananya dengan maksimal BAMUS dalam menjalankan fungsinya
3. kurangnya sarana dan prasarana, BAMUS nagari Bayua tidak memiliki kantor sendiri sehingga lembaga tersebut masih menumpang dengan kantor wali nagari yang membuat masyarakat kurang mengetahui fungsi BAMUS untuk menyalurkan aspirasi mereka. Dan wadah atau kantor itu sangat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibutuhkan guna memudahkan dalam pengorganisasian dan untuk mencapai suksesnya pembangunan.

6.2 Saran

Adapun saran penulis mengenai Pengawasan Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) Dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Nagari Bayua Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam sebagai berikut:

1. Diharapkan anggota BAMUS agar memaksimalkan pengawasannya terhadap pembangunan nagari yang tentunya dengan pengawasan yang maksimal akan menjamin pelaksanaan rencana akan berjalan baik.
2. Diharapkan agar BAMUS bisa mensosialisasikan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan menjelaskan bagaimana cara yang tepat dalam penyaluran aspirasi.
3. Kurangnya fasilitas penunjang seperti sarana dan prasana membuat kinerja BAMUS kurang maksimal, maka diharapkan kepada pemerintah nagari untuk dapat membangun Kantor BAMUS yang layak untuk kegiatan rapat dan masyarakat yang tentunya berguna untuk kemajuan nagari.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Halim.2004.*Manajemen Keuangan Daerah, EdisiRevisi*.Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Albert.2002.*Otonomi Daerah*,Jakarta: PT PercetakanPenebarSwadaya
- Alma, Buchari.2002. *Tambo Alam Tambo Adat Minangkabau*. Bandung: Alfabeta
- Arikunto.2004.*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*.Jakarta: Edisi Kelima, Rineka Cipta
- Bastion,Iron.2009.Analisis Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi”.*Skripsi*.Pekanbaru:Jurusan Ilmu Pemerintahan.
- Budiardjo,Miriam.2013.*Dasar-dasar Ilmu Politik*.Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama
- Hanif,Nurcholis. 2007. *Teoridan PraktikPemerintahan dan Otonomi daerah*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Harun,Rochajat dan Elvinaro Ardianto.2011. *Komunikasi Pembangunan & Perubahan Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Moelong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Marbun,B.N.,SH. 1994. *DPRD (Petumbuhan, Masalah dan Masa Depan*nya).Jakarta: Erlangga
- Misdianti dan Kartasapoetra.1993.*Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah*.Jakarta:Bumi Aksara
- Naim, Mochtar. 2005. *Bahan Kuliah Politik Lokal dan Pemerintahan Daerah pada Prodi Polokda Pascasarjana Universitas Andalas,....* , Padang
- Noer,Melinda.2006. Pembangunan Berbasis Kelembagaan Adat: Sebuah Alternatif Pembelajaran Dari Kasus Kinerja Kelembagaan *Nagari* Dalam Perencanaan Wilayah Di Propinsi Sumatera Barat. MIMBAR Jurnal Sosial dan Pembangunan.Volume XXII No. 2.
- Simabura, Charles.2011.*Parlemen Indonesia*.Jakarta: PT RajaGrafindoPersada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Situmorang Victor M dan Sitanggang, Cormentina. 1993. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Soeharyo Salamoendan Effendy Nasri. 2006. *Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara
- S.P, Hasibuan, Malayu. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Edisi Revisi. Bumi Aksara
- Subandi. 2011. *Ekonomi Pembangunan (Cetakan Kesatu)*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R& D*. Bandung: Alfabeta
- Terry, George R. & Leslie W. Rue. 2002. *Dasar- Dasar Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Todaro, Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga
- Widjaja, HAW. 2010. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Rajawali Pers: Jakarta
- Peraturan Pemerintah Kabupaten Agam No 12 Tahun 2017 pasal 58, Tentang Tugas dan wewenang BAMUS
- Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang- undang Dasar Tahun 1945
- Undang- undang No.6 Tahun 2014, Tentang Desa

UIN SUSKA RIAU

LAMPIRAN



Wawancara bersama Bapak Azwir



Wawancara bersama Bapak Zulkifli

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama Bapak Antoni, S.Pd

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Wawancara bersama Ibu Desi Fitria

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Bersama Ibu Delmi Fadli



Wawancara bersama Bapak Drs. Zul Afwan,MM



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web: www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

: Un.04/F.VII/PP.00.9/148/2020
: Biasa
: -
: Izin Riset

Pekanbaru, 10 Januari 2020 M
14 Jumadil Awwal 1441 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Barat
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Tika Triana
NIM. : 11675200226
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"Pengawasan Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) dalam Penyelenggaraan
Pembangunan di Nagari Bayua Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten
Agam" Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan
yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, MAg, MP
NIP. 19620512 198903 1 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

: Un.04/F.VII/PP.00.9/147/2020
: Biasa
: -
: Bimbingan Skripsi

Pekanbaru, 10 Januari 2020 M
14 Jumadil Awwal 1441 H

Kepada
Yth. Mashuri, MA
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,
Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Tika Triana
NIM : 11675200226
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi menyusun skripsi dengan judul: "Pengawasan Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Nagari Bayua Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

UIN SUSKA RIAU

Dekan,

NIP. 19620512 198903 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
KECAMATAN TANJUNG RAYA
NAGARI BAYUA

Alamat : Jalan Raya Marinjau – Lubuk Basung KM 4 Bayua Telp. (0752) 8102017

SURAT KETERANGAN
Nomor: 472/ 004/ SK / III / 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ANDIKA ILMIL SHI**
Jabatan : Sekretaris Nagari Bayua

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **TIKA TRIANA**
NIM : **11675200226**
Program Study : **Administrasi Negara**
Universitas : **UIN Suska RIAU**
Maksud : Benar yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian dan pengumpulan data di Kantor Wali Nagari Bayua Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam dengan Judul Tugas Akhir Pengawasan Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Nagari Bayua Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam.

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Bayua
Tanggal : 08 Maret 2020

a.n. WALI NAGARI BAYUA

Sekretaris





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jln.Setia Budi No.15 Padang Telp. 0751-811341, 811343 Fax. 0751-811342
<http://dpmpptsp.sumbarprov.go.id>

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 570 /487 - PERIZ/DPM&PTSP/II/2020

Rekomendasi Penelitian

- a. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;
- b. Bahwa sesuai konsideran huruf a diatas, serta hasil Verifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, berkas Persyaratan Administrasi Penelitian telah memenuhi syarat.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Sesuai Surat Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/148/2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang Mohon Surat Pengantar Izin Penelitian.

Dengan ini menerangkan bahwa kami memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

Nama	: Tika Triana
Tempat/Tanggal lahir	: Bayua/08 Maret 1998
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Jorong Lubuak Anyia, Desa Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat
Nomor Kartu Identitas	: 1306034803980003
Jabatan	: Pengawasan Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Nagari Bayua Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam
Lokasi Penelitian	: Kenagarian Bayua
Jadwal penelitian	: Februari 2020
Petanggung Jawab	: Tika Triana

Dengan keterangan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / Lokasi Penelitian;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
4. Bila terjadi penyimpangan dari maksud / tujuan penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 18 Januari 2020

A.n. GUBERNUR SUMATERA BARAT
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Tika Triana , Lahir di Bayur pada tanggal

08 Maret 1998, Anak ketiga dari Tiga

Bersaudara, dari pasangan ayahanda, Edy

Busri (Alm) dan Ibu Desmiarti. Pendidikan

Formal yang ditempuh oleh penulis adalah

SDN 02 Bayur, Lulus Tahun 2010,.

Kemudian melanjutkan pendidikan di MTs N

Tanjung Raya , Setelah menyelesaikan

pendidikan Mts,lulus Tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan di SMA N 1

Tanjung Raya dan lulus pada tahun 2016. Selanjutnya penulis melanjutkan

pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri dengan mengambil Jurusan Administrasi

Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sebagai tugas akhir

perkuliahan penulis melaksanakan penelitian dengan judul **“Pengawasan Badan**

Munyawarah Nagarai (Bamus) Dalam Penyelenggaraan Pembagunan di

Nagari Bayua Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam”.. Penulis

dinyatakan lulus pada sidang munaqasyah tanggal 10 Agustus 2020 jurusan

Administrasi Negara pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dan berhak

menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos).